

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

M. Firza Alpi¹⁾, Rio Febrian Sirait²⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : m.firzaalpi@umsu.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : riofebrian@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of economic growth, local revenue, general allocation funds and special allocation funds on capital expenditures in regencies/cities in the province of North Sumatra. This research is a type of associative research. The sampling technique was carried out using a purposive sampling technique. So that the sample obtained is 31 regencies/cities in the province of North Sumatra with a total of 165 observational data for 5 years of observation. The data collection technique used is documentation with data sources using secondary data taken through the official website of the Ministry of Finance DJPK. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis with SPSS 26 software. The results of this study indicate that economic growth has no effect on capital expenditures. Local revenue does not have a significant effect on capital expenditure. General allocation funds have a significant effect on capital expenditures. Special allocation funds have a significant effect on capital expenditures. Then economic growth, regional original income, general allocation funds and special allocation funds and simultaneously affect capital expenditures

Keywords: *Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Oktora, Eka & Pontoh (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal

merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien (Wandira, 2012).

Menurut Lubis & Hafni (2017) Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya yaitu pendapatan transfer.

Pendapatan transfer seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil difungsikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pendapatan transfer memiliki hubungan terhadap belanja modal dan memberikan pengaruh yang panjang serta jika adanya pengurangan akan menyebabkan penurunan belanja modal (Lubis & Hafni, 2019).

Belanja Modal

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Halim (2014) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah "beban modal" sebagai padanan dari belanja modal.

Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dimiliki daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004) mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu "pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah".

Yani (2008) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah yaitu "pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai dengan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, maka Provinsi dan kabupaten serta kota masing-masing memperoleh Dana Alokasi Umum yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas fiskal tiap-tiap daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat umum (*block grants*) dan berfungsi sebagai instrument penyeimbang fiskal antar daerah.

Hal ini disebabkan tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). Masing-masing daerah memiliki perbedaan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya, kondisi dan kekayaan alam, dan sebagainya sehingga kemampuan fiskal atau keuangan antardaerah berbeda-beda.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Nomor 25 Tahun 1999, DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri APBN setiap tahun. 90% dari 25% DAU tersebut dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota, sedangkan sisanya 10% dari 25% DAU dialokasikan untuk pemerintah tingkat provinsi.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Yani (2008). Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah memperoleh alokasi DAK.

DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Kriteria umum pengalokasian DAK diprioritaskan untuk

daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional. Sedangkan kriteria khusus pengalokasian DAK memperhatikan daerah-daerah tertentu yang memiliki karakteristik.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan riil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2006). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perolehan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya. Sehingga mendorong terjadinya kenaikan terhadap pendapatan daerah dari hasil pajak.

Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur perekonomian. Syarat penting yang akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kerangka Konseptual Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Kebijakan ekonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah dan merupakan proses kenaikan output per kapita yang diukur dengan Produk Domestic Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi setiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu daerah tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya ekonomi

investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal ini mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan pra sarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah itu sendiri.

Salah satu dana perimbangan adalah dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana alokasi khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh antara belanja modal dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui dana alokasi khusus.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di provinsi sumatera utara tahun 2014-2018. Data yang diperoleh berdasarkan situs resmi DJPK Kemenkeu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi sumatera utara tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria penentuan sampel, maka di temukan 31 sampel yang memenuhi kriteria. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi yaitu, dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan anggaran dan realisasi kabupaten/kota di provinsi sumatera utara tahun 2014-2018.. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji determinasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26349747
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.032
	Negative	-.053
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (-2tailed) lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 yang berarti bahwa

data telah berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah lolos uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Tolerance	VIF
1	PE (X1)	.926	1.080
	PAD (X2)	.570	1.754
	DAU (X3)	.523	1.914
	DAK (X4)	.669	1.496

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai masing-masing variabel menghasilkan nilai Tolerance sebesar > 0,1 dan nilai VIF < 10,0. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinieritas karena masing-masing variabel memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10,0.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.624	.991		-.630	.530
	PE (X1)	.003	.025	.008	.102	.919
	PAD (X2)	.050	.022	.238	2.255	.066
	DAU (X3)	-.012	.048	-.029	-.259	.796
	DAK (X4)	-.004	.024	-.016	-.163	.871

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai sig semua variabel independen sudah lebih dari 0,05, sehingga dalam model

regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi ini telah memenuhi uji heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.711 ^a	.506	.493	.26699	1.212

a. Predictors: (Constant), DAK (X4), PE (X1), PAD (X2), DAU (X3)

b. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat dilihat bahwa nilai D-W sebesar 1,212. Artinya nilai D-W diantara -2 sampai +2.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.460	1.674		5.054	.000
	PE (X1)	.063	.043	.088	1.480	.141
	PAD (X2)	.064	.038	.129	1.695	.092
	DAU (X3)	.401	.081	.392	4.936	.000
	DAK (X4)	.190	.040	.333	4.740	.000

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 5 maka dapat dilihat persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 8,460 + 0,063X1 + 0,064X2 + 0,401X3 + 0,190X4 + e$$

Dari persamaan ini dapat di intepretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) bernilai positif yaitu 8,460. Artinya jika seluruh variabel independen nilainya adalah 0, maka belanja modal nilainya adalah 8,460.
2. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 0,063. Artinya jika variabel independen lainnya tetap dan PE mengalami kenaikan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,063.
3. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,064. Artinya jika

variabel independen lainnya tetap dan PAD mengalami kenaikan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,064.

4. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,401. Artinya jika variabel independen lainnya tetap dan DAU mengalami kenaikan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,401.
5. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,190. Artinya jika variabel independen lainnya tetap dan DAK mengalami kenaikan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,132.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 6
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.460	1.674		5.054	.000
	PE (X1)	.063	.043	.088	1.480	.141
	PAD (X2)	.064	.038	.129	1.695	.092
	DAU (X3)	.401	.081	.392	4.936	.000
	DAK (X4)	.190	.040	.333	4.740	.000

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 6 diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi (PE) bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena pada t_{hitung} sebesar 1,480 dan t_{tabel} sebesar 1,976. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,480 < 1,976$). Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,141. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,141 > 0,05$). Artinya pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena pada t_{hitung} sebesar 1,695 dan t_{tabel} sebesar 1,976. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,695 < 1,976$). Artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,092. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,092 > 0,05$). Artinya pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena pada t_{hitung} sebesar

4,936 dan t_{tabel} sebesar 1,976. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,936 > 1,976$). Artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Artinya dana alokasi umum signifikan terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena pada t_{hitung} sebesar 4,740 dan t_{tabel} sebesar 1,976. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,740 > 1,976$). Artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Artinya dana alokasi khusus signifikan terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.957	4	2.739	38.427	.000 ^b
	Residual	10.692	150	.071		
	Total	21.649	154			

a. Dependent Variable: BM (Y)

b. Predictors: (Constant), DAK (X4), PE (X1), PAD (X2), DAU (X3)

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 7 maka dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} 38,427 dan nilai sig sebesar 0,000. Kemudian untuk mencari nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan jumlah df (n_1) = 4, dan df (n_2) = 150 ($n-k-1$) atau 155-4-1. Sehingga diperoleh F_{Tabel} sebesar sebesar 2,43. Maka artinya $F_{hitung} >$

F_{tabel} dan nilai sig < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.506	.493	.26699

a. Predictors: (Constant), DAK (X4), PE (X1), PAD (X2), DAU (X3)

b. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Output Spss V.26 (Diolah penulis, 2021)

Berdasarkan hasil tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,493 atau 49,3%. Artinya kontribusi nilai variabel independen mampu menjelaskan terhadap variabel dependen sebesar 49,3%. Sedangkan sisanya 50,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,480 < 1,976$. Kemudian nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,141 Dengan demikian disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja dikarenakan

pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana langsung kepada daerah. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan kondisi perekonomian daerah dan tidak memberikan pemasukan terhadap daerah. Menurut Sari, Kepramareni & Novitasari (2017) Pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryadi (2014), Ardhani (2011) dan Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,695 < 1,976$. Kemudian nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,092. Maka artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal belum tentu juga akan semakin tinggi. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

Menurut Yovita (2011) provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar cenderung tidak memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,936 > 1,976$. Kemudian nilai signifikansi variabel dana alokasi umum lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Maka artinya dana alokasi

umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi, arah koefisien variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai positif yaitu 0,401. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dana alokasi umum mengalami kenaikan, maka belanja modal juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,401. Karena dana alokasi umum yang meningkat berpengaruh pada kenaikan belanja modal, maka artinya dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU diperuntukkan untuk digunakan belanja Modal dan hanya sedikit untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.

Menurut Suratno (2009) dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBD sehingga kemandirian daerah tidak terjadi lebih baik, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,740 > 1,976$. Kemudian nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Maka artinya dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi, arah koefisien variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai positif yaitu 0,190. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dana alokasi

khusus mengalami kenaikan, maka belanja modal juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,190. Karena dana alokasi khusus yang meningkat berpengaruh pada kenaikan belanja modal, maka artinya dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan dana alokasi khusus diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan Program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Sehingga ada keterkaitan dana alokasi khusus yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Jadi semakin tinggi dana alokasi khusus yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.

Hal ini dapat dilihat dari uji F yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $38,427 > 2,43$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) dalam regresi ini adalah 0,493 atau 49,3%. Artinya kontribusi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi belanja modal sebesar 49,3%. Sedangkan sisanya 50,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.
- b. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.
- c. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.
- d. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.
- e. Hasil pengujian secara simultan memperlihatkan bahwa semua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian sehingga dapat dilihat secara kompleks, bukan hanya berfokus pada satu provinsi saja.
- b. Periode penelitian hanya 5 tahun, penenliti selanjutnya disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adytama, E., & Oktaviani, R. E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi
- Abdullah, S., & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa-Bali. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI*.
- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntan & Keuangan*. 2(3), 103-114
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Darwanti., & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Dewi, S. P., & Suyanto. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*.
- Devas, et al. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Edisi Ketiga). Universitas Indonesia.
- Halim, A. (2004). *Analisis Investasi* (Edisi Pertama). Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Jaeni & Anggana, L (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Unisbank Semarang*.
- Jaya & Dwirandra, A.A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,7(1), 79-92.
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dstrategi, dan Peluang*. Erlangga.
- Kusnandar & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Univertsitas Indonesia*.
- Latifah, N. P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Fokus Ekonomi*,5(2), 85-94
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013,1(1)
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Maslikah, S. H. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*
- Maryadi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*

- Oktora., Eka, F., & Pontoh, W. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurusan Accountability*. 2(1)
- Putro, N. S. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 105 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan*
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*
- Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Junral Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(1), 15-29
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, (18)2.
- Sinulingga, S. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Situngkir, A. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Anggaran Belanja Modal Studi di Kabupaten/Kota Sumatra Utara. *Universitas Sumatrea Utara*.
- Solikin, I (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Prenada Media Group.
- Sumarni, S. (2008). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
- Suratno, P. N. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2006-2008). *Jurnal Ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*
- Susanti. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *Universitas Telkom Bandung*, 3(3).

Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal of Economic, Managemen and Accounting*, 2(2).

Taiwo, M., & Abayomi, T. (2011). Government Expenditure and Economic Development. *European Journal of Business and Management*. 9(3).

Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK,

PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DI Indonesia. *Jurnal Universitas Pattimura Ambon*, 1(2).

Wandhira, A. G. (2012). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 44–51.

Wertianti, I. G., & Dwirandra, A. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(3), 563-584

Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.